

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR

TAHUN : 2019

PENILAIAN				Tindak Lanjut dan Progres		Keterangan
A. PROSES (60)						
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)						
1 Tim Kerja (1)						
		a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	Pengadilan Agama Kota Banjar Telah membentuk Tim Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	SK Pembangunan Zona Integritas	Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
		b.	Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	Penentuan Anggota Tim Zona Integritas Pengadilan Agama Kota Banjar telah melalui prosedur dan mekanisme yang Jelas		a. Dengan prosedur/mechanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak di seleksi
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)						
		a.	Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	Pengadilan Agama Kota Banjar telah membuat Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Agama Kota Banjar		Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
		b.	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	Semua Target-target prioritas Pengadilan Agama Kota Banjar telah relevant dengan WBK /WBBM		a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
		c.	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	Media sosialisasi WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Kota Banjar melalui Website, Layar Informasi dan Spanduk	1. Dokumen Pencanangan Zona Integritas; 2. Banner ZI	Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)						
		a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	Semua Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana		a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
		b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah ditindaklanjuti per bulan		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

						a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah diindikasikan; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah diindikasikan; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah diindikasikan; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum diindikasikan
	4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)				
		a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM ?	Ya, Pimpinan pada Pengadlan Agama Kota Banjar telah memberi teladan nyata contoh nyata. Ketua memantau laporan Disiplin kehdhtran Halam dan pegawal setiap hari, ketua membuat laporan kepatuhan terhadap jalannya tupoksi kepada KPRA Jabar			Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata, misalnya menggi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
		b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	Agan perubahan sudah ditetapkan melalui SK KPA Jawa Barat Tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Priaku Budaya Kerja dilingkungan Pengadlan Agama Kota Banjar tahun 2019, Nomor W11.U/94/SP.03/1/2018 .			Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
		c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	Pengadlan Agama Kota Banjar telah melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui Penunjukan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SK Penunjukan Tim Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu			Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
		d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	Seluruh jajaran pada Pengadlan Agama Kota Banjar telah terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari Seluruh Jajaran diakomodasikan dalam keputusan Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI)			a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	II. PENATAAN TATAKASAMA (5)					
	1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)				
		a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	Semua Unit SOP pada Pengadlan Agama Kota Banjar telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras	1. Dokumen SOP Manajemen, Kepaniteraan dan Kesekretariatan, 2. Dokumen Peta Proses Bisnis		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

[illegible]

	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A/B/C/D	A	1	Seluruh SOP utama pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah direvisi dan telah ditandatangani berupa perubahan SOP atau uiauan perbaikan SOP.	Dokumen Daftar Rapat Evaluasi SOP, SK KPT Tentang Tim Evaluasi SOP	a. Jika seluruh SOP utama telah direvisi dan telah ditandatangani berupa perubahan SOP atau uiauan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah direvisi dan telah ditandatangani berupa perubahan SOP atau uiauan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah direvisi tetapi belum ditandatangani d. Jika sebagian kecil SOP utama telah direvisi
2	E-Office (2)	2.0		2.00	100.00%		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpadu yang menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
	a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1	Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah menggunakan aplikasi SKP dan Kinerja penyelesaian perkara melalui Aplikasi SPP	Dokumen Aplikasi SPP dan Kinerja Penyelesaian perkara Melalui Aplikasi SPP	
	b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1	Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah Menggunakan aplikasi SIKEP	Dokumen Aplikasi SIKEP	a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpadu c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
	c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	A/B/C	A	1	Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Siwas, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPP	Dokumen Aplikasi Siwas Dokumen Aplikasi SIKEP Dokumen Aplikasi SIPP Dokumen SOP PTSP	a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpadu c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
	d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Agama Kota Banjar?	A/B/C/D	A	1	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah dilakukan per bulan melalui aplikasi Kondaras	Dokumen Laporan Kondaras Bulanan	a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit. b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan. c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran. d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
3	Keterbukaan Informasi Publik (1.5)	1.5		1.50	100.00%		
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	V/T	Ya	1	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Agama Kota Banjar sudah diterapkan	Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tentang Susunan Penanggung Jawab Tugas Pelayanan Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor WT.1.U/17/KP.11.01/IV/2014	Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan c. mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	Y/T	Ya	1		Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Dokumen Rapat Evaluasi Baperjikat)	Dokumen Rapat Evaluasi Baperjikat	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)	3.0		3.00	100.00%			
	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi?	Y/T	Ya	1		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi yang merupakan temuan Tugan Tugan dan fungsi Balitbang Badan Diklat Mahkamah Agung RI.	Dokumen Analisa beban kerja Dokumen Proyeksi kebutuhan Pegawai Dokumen Peta Jabatan Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A/B/C/D	A	1		Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Agama Kota Banjar telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.	Dokumen Analisa beban kerja Dokumen Proyeksi kebutuhan Pegawai Dokumen Peta Jabatan Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat	a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
	c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A/B/C/D	A	1		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Agama Kota Banjar dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%	Dokumen Analisa beban kerja Dokumen Proyeksi kebutuhan Pegawai Dokumen Peta Jabatan Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat	a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% 75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
	d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A/B/C/D	A	1		Seluruh pegawai di Unit Kerja Pengadilan Agama Kota Banjar telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dengan mengacu pada usulan untuk mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis, Diklat PIM III, IV kepada Badan Diklat Mahkamah Agung RI.	Dokumen Usulan Diklat Hakim Lingkungan Dokumen Usulan Diklat Hakim SP-PA Dokumen Usulan Diklat PIM IV & III Dokumen Usulan Diklat Bendahara	a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
	e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?	A/B/C/D	A	1		Unit kerja Pengadilan Agama Kota Banjar telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	Dokumen Surat Tugas Mengikuti Diklat	a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai. c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai. d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perubahan kinerja?	A/B/C/D	A	1		Laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan kinerja telah dilakukan Tahunan (Laporan Tahunan 2018 dari Sub Bagian Kepegawaian dan Rencana PT Jawa Barat)	<div>Dokumen Laporan Tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan TI Tahun 2017</div> <div>Dokumen Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Tinggi Jawa Barat</div>	<p>a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perubahan kinerja dilakukan tahunan;</p> <p>b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perubahan kinerja dilakukan triwulan;</p> <p>c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perubahan kinerja dilakukan semesteran;</p> <p>d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perubahan kinerja dilakukan tahunan</p>
4	Penetapan kinerja individu (a)	4,0		3,50	87,50%			<p>a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p>
	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1		Penetapan Kinerja Individu dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan	<div>Dokumen PKT Tahun 2017</div>	<p>a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya;</p> <p>b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya;</p> <p>c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya;</p> <p>d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya</p>
	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya	A/B/C/D	A	1		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level dasarnya	<div>Dokumen Target SIP Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian</div> <div>Dokumen Target SIP Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran</div>	

	c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A/B/C/D/E	C	0,5		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran	<div>Dokumen SOP Panitia</div> <div>Dokumen SOP sekretaris</div>	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	A/B/C/D	A	1		Hasil penilaian kinerja individu pada Pengabdian Agama Kota Banjar telah dijadikan dasar untuk pemberian reward sebagai role model	<div>Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tentang Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku Dan Budaya Kerja Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor : W.11.0/94/KP.03.7/2017</div>	a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)	3,0		3,00	100,00%		<div>Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang Kewajiban Jam Kerja Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : W.11.0/114/KP.02.1/10/2017</div> <div>Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang Kewajiban dan Ketertarikan Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : W.11.0/65/KP.02.1/7/2016</div> <div>Dokumen Sosialisasi Perma No.7.9.9 tahun 2016</div> <div>Dokumen Sosialisasi Olj/Maklumat/GMA/IX/2017</div>	a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
6.	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	1,0		1,00	100,00%		<div>Dokumen Data SIKEP terlampir</div>	a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A/B/C/D	A	1		Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan		
IV. PENGUJUTAN AKUNTABILITAS (10)		10,0		10,00	100,00%			
1.	Keterlibatan pimpinan (5)	5,0		5,00	100,00%			
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Y/T	Ya	1		Ya, pimpinan pada Pengadilan Agama Kota Banjar terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	<div>Dokumen Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja</div> <div>Dokumen Rapat Penyusunan Target IKU dan Renstra</div> <div>Dokumen Rapat Perencanaan</div> <div>Dokumen Rapat Persiapan Laporan Ujjar 2017</div> <div>Dokumen Rapat Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Program dan Anggaran Terintegrasi</div> <div>Dokumentasi Rapat Perencanaan</div> <div>Dokumentasi Rapat Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Program dan Anggaran Terintegrasi</div> <div>Dokumentasi Rapat DC Zi Area Peningkatan Akuntabilitas</div>	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

						Dokumen Rapat Perencanaan	
	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?	Y/T	Ya	1		Ya, pimpinan pada Pengabdian Agama Kota Banjar telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja (dokumen rapat terlampir)	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Y/T	Ya	1		Ya, pimpinan pada Pengabdian Agama Kota Banjar telah memantau pencapaian kinerja secara berkala	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (S)	5,0		5,00	100,00%		
	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	A/B/C	A	1		Unit kerja Pengabdian Agama Kota Banjar telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen SAKIP terlampir) dan telah di upload Aplikasi E-SAKIP	a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja); b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	A/B/C/D	A	1		Dokumen perencanaan Pengabdian Agama Kota Banjar telah berorientasi hasil (dokumen SAKIP terlampir)	a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
						Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKUP) Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2018 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKJ) 2019 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Dokumen Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dokumen Review Rencana Strategis (RENSTRA)	
						Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKUP) Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2018 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKJ) 2019 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Dokumen Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Dokumen Review Rencana Strategis (RENSTRA)	

	c. Apakah terdapat indikator Kinerja Utama (IKU)	A/B/C	A	1	Telah terdapat indikator Kinerja Utama (IKU) (dokumen IKU terlampir)	Dokumen Renc. indikator kinerja Utama (IKU)	a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
	d. Apakah indikator kinerja telah SMART	A/B/C/D	A	1	Indikator kinerja telah mengfuli kaidah SMART (dokumen IKU terlampir)	Dokumen Renc. indikator Kinerja Utama (IKU)	a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Y/T	Ya	1	Ya, laporan kinerja telah disusun tepat waktu (dokumen terlampir)	Dokumen Surat Pengantar Dokumen Surat SEKMA	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C/D	A	1	Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja (laporan kinerja terlampir)	Dokumen Laporan kinerja instansi Pemerintah (LXIP)	a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1	Mengikutsertakan SDM Pada Subagian Program dan Anggaran untuk Diklat Teknis Perencanaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusdiklat Mahamahi Agung R.I.	Dokumen Pemanggilan Diklat Perencana	a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja
	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A/B/C	A	1	SDM yang telah memiliki sertifikat DIKLAT teknis perencanaan (sertifikasi pengelola teknis perencanaan terlampir)	Dokumen Sertifikat Diklat Teknis Perencanaan Angkasan I	a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ; c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
V. PENGUJIAN PENGAMASAN (35)		15,0		35,00	100,00%		
1. Pengendalian Grafifikasi (3)		3,0		3,00	100,00%		
	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian grafifikasi	A/B/C	A	1	Unit kerja pengendalian Agama Kota Banjar telah public campaign telah dilakukan secara berkala melalui Layar Informasi dan Liputan Perencanaan Pembangunan Zona Integrasi melalui media massa (TV)	Dokumen Layar Informasi Pengendalian Grafifikasi Liputan TV Tentang Perencanaan dan Sosialisasi Pembangunan WBC/WBSM Pengendalian Tinggi Jawa Barat	a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign
	b. Pengendalian grafifikasi telah diimplementasikan	A/B/C	A	1	Unit kerja pengendalian Agama Kota Banjar telah mengimplementasikan pengendalian grafifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian grafifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Dokumen Surat Keputusan Tim Pengendali Grafifikasi Pada Pengendalian Tinggi Jawa Barat terlampir Nomor W111/J/234/OT.01.3/2017 Tanggal 1 Maret 2017 dan Surat Keputusan Tim Pengendali Grafifikasi Pada	a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian grafifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat karakterstik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian grafifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian grafifikasi
2	Penerapan SHIP (3)	3,0		3,00	100,00%		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	b. Whistle Blowing System telah diterapkan	A/B/C/D	A	1	Unit kerja Pengendalian Agama Kota Banjar telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Dokumen SK KPT tentang Tim Pengelola Whistle Blowing System Nomor W11.U/99/KP.02.02/5/2018	a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A/B/C/D	A	1	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan setiap Bulan	Dokumen Laporan Monev Peta Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1	Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengendalian Agama Kota Banjar	Dokumen Laporan Monev Peta Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)	a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
5	Penanganan Bantuan Kepentingan (3)	3,0		3,00	100,00%		
	a. Tugas fungsi utama	Y/T	Ya	1	Unit kerja Pengendalian Agama Kota Banjar telah mengidentifikasi/memecahkan bantuan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Dokumen SK KPT tentang Tim Pengelola Tinggri Jawa Barat tentang Satuan Tugas Penanganan Bantuan Kepentingan pada Pengendalian Tinggri Jawa Barat Nomor W11.U/65/KP.02.2/4/2016	Ya, jika unit kerja telah mengidentifikasi/memecahkan bantuan kepentingan dalam tugas fungsi utama
	b. Penanganan Bantuan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A/B/C/D	A	1	Penanganan Bantuan Kepentingan disosialisasikan/internalisasikan ke seluruh unit kerja	Dokumen Rapat Sosialisasi Bantuan Kepentingan	a. Jika penanganan Bantuan Kepentingan disosialisasikan/internalisasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Bantuan Kepentingan disosialisasikan/internalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Bantuan Kepentingan disosialisasikan/internalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Bantuan Kepentingan belum disosialisasikan/internalisasikan ke seluruh unit kerja
	c. Penanganan Bantuan Kepentingan telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	1	penanganan Bantuan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja	Dokumen Rapat Sosialisasi Bantuan Kepentingan	a. Jika penanganan Bantuan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Bantuan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Bantuan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Bantuan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Bantuan Kepentingan	A/B/C	A	1	Penanganan Bantuan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja Pengendalian Agama Kota Banjar	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepentingan	a. Jika penanganan Bantuan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Bantuan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Bantuan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

7	6	5	4	3	2	1	0	Menyumbang dan Evaluasi Bertujuan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1		Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengendalian Agama Kota Banjar		<p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;</p> <p>d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Bertujuan Kepentingan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja</p>

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)									
1	Standar Pelayanan (3)	10,0	3,0		10,00	3,00	100,00%	100,00%	
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A/B/C	A	1	Unit kerja Pengadilan Agama Kota Banjar telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<div>Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DU/SK/HM02.3/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi</div> <div>Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang Nomor: W11.U/87/JP.02.2/5/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Penunjukan Pejabat Pengelola PTSPS Petugas Pengelola PTSP pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat</div> <div>Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat</div>	<div>a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</div> <div>b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;</div> <div>c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan</div>		
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A/B/C/D	A	1	Unit kerja Pengadilan Agama Kota Banjar telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<div>Dokumen Maklumat Pelayanan tentang Humas Pengadilan Tinggi Jawa Barat W11.U/56/Hm.00/II/2016 Ketua Pengadilan Tinggi</div> <div>Dokumen Maklumat Pelayanan tentang Meja Informasi (DESKINFO) Pengadilan Tinggi Jawa Barat W11.U/56/Hm.03/II/2016 Ketua Pengadilan Tinggi</div> <div>Dokumen Maklumat Pelayanan tentang Perputakaan Pengadilan Tinggi Jawa Barat W11.U/56/Hm.02.2/II/2016 Ketua Pengadilan Tinggi</div>	<div>a. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</div> <div>b. Jika unit kerja memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</div> <div>c. Jika unit kerja memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</div> <div>d. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</div>		
	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A/B/C/D	A	1	Unit kerja Pengadilan Agama Kota Banjar telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;	<div>Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan</div> <div>Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang Nomor: W11.U/87/JP.02.2/5/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Penunjukan Petugas Pengelola PTSP Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat</div> <div>Dokumen SK Penunjukan Tim Evaluasi atau Penyesuaian SOP</div> <div>Dokumen Undangan Rapat Evaluasi SOP</div>	<div>a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berniat melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;</div> <div>b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;</div> <div>c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP</div>		
2	Budaya Pelayanan Prima (3)	3,0		3,00	100,00%				

[illegible]

e. Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	A	1	Terdapat inovasi pelayanan melalui adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Penyelenggaraan Umum Nomor 77/DJ/SK/HM/02.3/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan pjs seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan pjs sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan pjs dengan unit kerja lain; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3	Pemilihan kepuasan terhadap pelayanan (4)	4,0		4,00	100,00%	Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat	
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,97 yang berada pada kategori "SANGAT BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Banjar	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	A	1	Hasil survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Agama Kota Banjar	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, website, melalui c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media d. Diakses tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat e. Diakses tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat f. Hasil survei kepuasan masyarakat sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat g. Diakses tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	A	1	Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan rekomendasi yang disarankan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Tahun 2017	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	
TOTAL PENGUNGKIT		60,0		59,50			
B. HASIL (40)							
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)							
1.	Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	20,0		16,00	80%		
2.	Presentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	15,0	0-4	2,933333	11,00	73,33%	Indeks persepsi korupsi terhadap lembaga Pengadilan oleh Transparansi Internasional = 3,3
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)							
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,308	16,54	82,70%	Presentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat = 100%
TOTAL HASIL		40,0		32,54	81,35		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pengadilan Tinggi Jawa Barat = 82,7%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				93,04			Disisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

	e. Terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	A	1	Telah terdapat inovasi pelayanan melalui adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DU/SK/HM/02/3/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tingkat	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebelumnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebelumnya sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)	4,0		4,00	100,00%	Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat	
	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C	A	1	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan indeks Kepuasan Masyarakat (KM) sebesar 82,97 yang berada pada kategori "SANGAT BAIK" berdasarkan Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Banjar	Dokumen SK Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tentang Nomor: WJ1.U/87/KP.02/3/2018 Tanggal 2 Mei 2018 Penunjukan Petugas Pengelola Pelayanan Satu Pintu Pada	
	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A/B/C	A	1	Hasil survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Agama Kota Banjar	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media elektronik, radio dll) b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dll) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1	Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang disampaikan atas saran-saran yang diberikan responden sebagaimana disampaikan dalam laporan IKM Tahun 2017	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT				99,50			
B. HASIL (60)							
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)				16,00	80%		
1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	0-4	2,993333	11,00	73,33%	Indeks persepsi korupsi terhadap lembaga Peradilan oleh Transparansi Internasional = 9,3
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (%)	5,0	0-100%	100	5,00	100,00%	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal dan Eksternal pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat = 100%
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)				16,54	83%		
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	0-4	3,308	16,54	82,70%	Nilai Persepsi Kualitas pelayanan (Indeks Kepuasan Masyarakat) pengadilan Tinggi Jawa Barat = 82,7 %
TOTAL HASIL		40,0		32,54	81,35		Disi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				92,04			